Eksistensi Sanksi Qanun Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Aceh Barat

Inda Farwili¹, Syaibatul Hamdi²

^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh
Email Koresponden: indafarwili26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji eksistensi dan implementasi sanksi dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya rokok, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sanksi yang diatur dalam qanun tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksana kebijakan, pelanggar, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya sanksi yang jelas dalam qanun, implementasinya masih kurang efektif akibat kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut. Kesimpulannya, meskipun Qanun Nomor 14 Tahun 2015 memiliki dasar hukum yang kuat, eksistensi sanksinya belum optimal dalam mengubah perilaku masyarakat terkait merokok di kawasan tanpa rokok. Perlu upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap qanun ini.

Kata kunci: Eksistensi Sanksi, Qanun Nomor 14 Tahun 2015, Kawasan Tanpa Rokok

Pendahuluan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya penting yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok. Dalam konteks ini, Aceh Barat telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2015 sebagai dasar hukum bagi penerapan KTR di wilayah tersebut. Qanun ini mengatur berbagai aspek mengenai larangan merokok di tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai kawasan tanpa rokok, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Kawasan tanpa rokok tersebut diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: Rumah sakit, puskesmas, Klinik Kesehatan, Tempat Praktik Dokter/ Bidan/ Perawat, rumah bersalin, laboratorium, Toko Obat atau apotek, pabrik obat atau bahan obat posyandu, poskesdes, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan sarana kesehatan lainnya;
- b. Tempat proses belajar mengajar meliputi: Sekolah/Madrasah, Dayah/Pesantren, Perguruan Tinggi, Tempat pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan, Laboratorium pendidikan/ penelitian dan sarana pendidikan lainnya;
- c. Tempat anak bermain meliputi: Paud, Taman Kanak-kanak, Taman bermain, wahana permainan dalam dan atau luar gedung, tempat penitipan/ pengasuhan anak serta tempat bermain anak lainnya.
- d. Tempat ibadah meliputi: Masjid, Meunasah/ Mushalla, Bale Pengajian serta Tempat-tempat ibadah lainnya.
- e. Angkutan umum meliputi: Bus, Taxi, L300, Kapal Ferry, serta angkutan umum lainnya.
- f. tempat kerja meliputi: Kantor, Pabrik, Tempat Usaha dan tempat kerja Lainnya.
- g. Tempat umum meliputi: Pasar modern, Restoran/ rumah makan, Hotel/ Penginapan, sarana Olah raga, halte bus, ruang tunggu dan tempat umum lainnya.

Qanun ini tidak hanya mencakup larangan merokok di tempat umum, tetapi juga memberikan penegasan tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Eksistensi sanksi ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang telah dibuat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan (Hart, 2019). Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini meningkat, sehingga tujuan utama dari Qanun tersebut dapat tercapai (Rahmah, 2023).

Sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2015 ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran lisan, denda administratif, hingga sanksi sosial. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum

merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (Suaib, 2023). Efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakannya oleh aparat terkait.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan ini. Meskipun Qanun ini telah disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami dampak negatif merokok di tempat umum, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KTR.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam keberhasilan penerapan sanksi ini. Tanpa adanya sinergi yang baik antar pihak terkait, upaya penegakan sanksi hanya akan menjadi sebatas formalitas tanpa memberikan dampak signifikan (Atmasasmita, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara semua pihak untuk memastikan bahwa aturan ini dapat ditegakkan secara efektif dan efisien.

Aspek pengawasan juga memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Qanun ini. Pemerintah daerah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Pengawasan yang ketat akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi.

Di sisi lain, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan sanksi akan sulit dilakukan. Masyarakat diharapkan tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan Qanun ini akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok di Aceh Barat.

Selain itu, Qanun ini juga memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang lanjut usia, yang sangat rentan terhadap dampak negatif asap rokok. Dengan adanya

kawasan tanpa rokok, diharapkan kelompok-kelompok ini dapat terlindungi dari bahaya kesehatan yang disebabkan oleh paparan asap rokok (Nabila & Sakti, 2023).

Penerapan sanksi dalam Qanun ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi prevalensi merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan publik. Aceh Barat, dengan keberadaan Qanun ini, menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

Namun, efektivitas dari sanksi yang diatur dalam Qanun ini juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang pentingnya aturan ini, penerapan sanksi akan sulit mencapai tujuannya (Kartini, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap Qanun ini.

Keberadaan sanksi dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2015 ini juga menegaskan pentingnya peran regulasi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang disertai dengan sanksi yang jelas merupakan instrumen penting dalam upaya melindungi kepentingan umum. Dalam konteks ini, Qanun tentang kawasan tanpa rokok di Aceh Barat menjadi contoh bagaimana regulasi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Akhirnya, keberlanjutan penerapan Qanun ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan komitmen bersama, tujuan dari Qanun ini, yaitu menciptakan kawasan tanpa rokok yang benar-benar bebas dari asap rokok, dapat tercapai. Eksistensi sanksi yang kuat dan penerapan yang konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan Aceh Barat yang lebih sehat dan bebas dari bahaya asap rokok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara

mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk aparat penegak hukum, petugas kesehatan, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2015, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi. Selain itu, observasi lapangan dilakukan di beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok untuk melihat secara langsung tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut (Bachtiar, 2018). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan penegakan hukum, catatan pelanggaran, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disusun dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti efektivitas sanksi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan qanun. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan data sekunder (Ramadhan, 2021). Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai eksistensi dan efektivitas sanksi dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2015, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Pembahasan/hasil

B. Rokok Menurut Islam

Rokok merupakan potongan kecil daun tembakau yang dibungkus dengan kertas tipis dan direkatkan menggunakan perekat (Sulaiman, 2021). Bagi sebagian orang, merokok telah menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Fenomena ini menunjukkan pergeseran makna rokok dalam kehidupan manusia, yang awalnya hanya kebutuhan sekunder, kini telah menjadi kebutuhan primer (Hasni, 2019).

Dampak merokok tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis. Nikotin membuat seseorang

merasa perlu terus-menerus merokok, sehingga banyak perokok terjebak dalam kebiasaan buruk ini (Rochayati & Hidayat, 2015). Para ahli kesehatan menyatakan bahwa merokok memiliki dampak negatif yang luas bagi kesehatan dan dikenal sebagai salah satu penyebab utama kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, impotensi, serta gangguan pada kehamilan dan janin (Rini & Majid, 2022). Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan utama, menyebabkan pembesaran sel mukosa (hipertrofi) dan peningkatan jumlah kelenjar lendir (hiperplasia) (Aurora et al., 2023). Di saluran pernapasan kecil, terjadi peradangan ringan hingga penyempitan akibat peningkatan jumlah sel dan penumpukan lendir. Di jaringan paru-paru, terjadi peningkatan sel inflamasi dan kerusakan alveoli.

Mengingat banyaknya dampak negatif dari merokok, baik bagi perokok maupun orang di sekitarnya, dibuatlah aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau ruangan yang dinyatakan terlarang untuk aktivitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.

Selain berdampak pada perokok, merokok juga dapat membahayakan orang lain, terutama mereka yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi melalui ijtihad. Seperti halnya masalah yang hukumnya ditentukan melalui ijtihad, hukum merokok menjadi subjek perbedaan pendapat di kalangan ulama (MUI, 2002). Perbedaan pandangan di antara para ahli fikih mengenai hukum merokok memang tidak dapat dihindari dan sering kali berakhir dengan kontroversi yang tak berkesudahan. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima dalam sebuah diskusi untuk menetapkan suatu hukum. Meskipun banyak fatwa terkait hukum merokok telah terdokumentasikan, kontroversi tetap berlangsung.

Perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum merokok adalah hal yang wajar dan sulit dihindari, sering kali berujung pada kontroversi. Keanekaragaman pandangan ini telah menghasilkan berbagai fatwa yang telah banyak terdokumentasikan. Ada beberapa pandangan yang

dihasilkan mengenai hukum merokok. Pertama, pendapat yang mengharamkan. Kedua, pendapat yang memakruhkan. Ketiga, pendapat yang membolehkan. Keempat, sikap yang tidak mengambil posisi apapun, dan Kelima, pandangan bahwa merokok bisa terkena semua hukum tersebut (haram, makruh, atau mubah) tergantung situasi dan kondisi (Salman & Asari, 2003).

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok melalui keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Alasan Muhammadiyah mengharamkan rokok adalah karena:

1. Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabâits* (segala yang buruk),
2. Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri
3. Larangan perbuatan mubazir
4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain
5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan
6. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqâsid asy-syarî'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifd ad-dîn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*al-mâl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsân*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungannya.

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) juga mengeluarkan fatwa terkait hukum rokok. Menurut NU, rokok merupakan hal baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang pasti. Mengenai hukum merokok, NU tidak mengeluarkan keputusan resmi seperti Muhammadiyah. Namun,

persoalan ini dibahas dalam Mukhtamar NU ke-2 yang tercantum dalam *Ahkamul Fuqaha* (kumpulan keputusan Mukhtamar NU) (Nasyr, 2011).

Dalam konteks hukum makruh yang diterapkan pada rokok, tidak serta merta dikategorikan sebagai makruh yang mendekati haram. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai pertimbangan yang menjadi dasar untuk menyeimbangkan hukum makruh tersebut, sehingga kemakruhannya lebih mendekati kebolehan, yang dikenal juga dengan istilah makruh tanzih.

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa terkait hukum rokok. Dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa secara umum, hukum merokok adalah makruh dalam Islam. Namun, merokok dapat berubah menjadi haram jika dilakukan oleh anak-anak, wanita hamil, orang sakit yang telah dilarang merokok oleh dokter, atau jika merokok dilakukan di tempat umum. Alasan Majelis Ulama menetapkan hukum rokok adalah:

1. Merokok membahayakan kesehatan (*dlarar*), baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, terutama yang berada di sekitarnya. Sisi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia yang semakin mengkhawatirkan, dari hasil data penelitian WHO memaparkan bahwa setiap 6 detik ada seorang manusia yang mati karena terkait dengan rokok. Mereka berpendapat bahwa usaha pemerintahan untuk mengurangi kebiasaan merokok tidak berhasil dan dapat dikatakan gagal total. Iklan rokok yang berbunyi merokok bisa menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada jantung, janin dan bisa menyebabkan impotensi pun tidak mampu membendung nafsu memanjakan nikotin dan bahkan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
2. Jumlah usia perokok yang semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar sudah banyak yang mulai merokok bahkan mereka juga merokok secara terang-terangan.
3. Merokok berpotensi terjadinya israf (pemborosan) dan menjadi mubazir (*tabzdir*).

4. Tidak adanya kejelasan hukum baik dalam alQur'an maupun al-hadits tentang hukum merokok. Sehingga para ulama perlu melakukan ijtihad mengenai hal tersebut (MUI, 2002).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama tidak sepakat tentang hukum rokok, ada yang mengharamkan, memakruhkan dan ada juga yang memubahkannya. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas mengenai hukum rokok dalam Al-Qur'an dan hadits sehingga para ulama menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum rokok.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kabupaten Aceh Barat mempunyai kawasan tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam pasal 5 Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: Rumah sakit, puskesmas, Klinik Kesehatan, Tempat Praktik Dokter/ Bidan/ Perawat, rumah bersalin, laboratorium, Toko Obat atau apotek, pabrik obat atau bahan obat, posyandu, poskesdes, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan sarana kesehatan lainnya;
2. Tempat proses belajar mengajar meliputi: Sekolah/Madrasah, Dayah/Pesantren, Perguruan Tinggi, Tempat pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan, Laboratorium pendidikan/ penelitian dan sarana pendidikan lainnya.
3. Tempat anak bermain meliputi: Paud, Taman Kanak-kanak, Taman bermain, wahana permainan dalam dan atau luar gedung, tempat penitipan/ pengasuhan anak serta tempat bermain anak lainnya.
7. Tempat ibadah meliputi: Mesjid, Meunasah/ Mushalla, Bale Pengajian serta Tempat-tempat ibadah lainnya.
8. Angkutan umum meliputi: Bus, Taxi, L300, Kapal Ferry, serta angkutan umum lainnya.

9. Tempat kerja meliputi: Kantor, Pabrik, Tempat Usaha dan tempat kerja lainnya.
10. Tempat umum meliputi: Pasar modern, Restoran/ rumah makan, Hotel/ Penginapan, sarana Olah raga, halte bus, ruang tunggu dan tempat umum lainnya.

Pelanggar ketentuan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun denda. Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 25 mencakup teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin. Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat juga dikenakan denda yang berkisar dari Rp. 100.000,00 hingga Rp. 5.000.000,00.

Meskipun Kabupaten Aceh Barat memiliki regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok, masih banyak masyarakat yang merokok di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok, seperti di kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah seperti masjid dan mushalla, bahkan di lembaga pendidikan. Kondisi ini membuat Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok tampak seperti sekadar peraturan tertulis yang kurang efektif.

Terkait penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Muhammad Samsuddin, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari instansi terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini hanya berupa sosialisasi, seperti pemasangan spanduk yang memuat larangan merokok. Hingga saat ini, sanksi bagi pelanggar belum diterapkan secara tegas, dan pelanggar hanya mendapat teguran dari petugas keamanan instansi. Misalnya, di Kantor Bupati Aceh Barat, orang hanya tidak merokok di dalam ruangan yang ber-AC, sementara di luar ruangan masih banyak yang merokok. Hal ini terjadi

karena aturan belum diterapkan secara menyeluruh, seperti penyediaan fasilitas khusus untuk merokok dan pemberian sanksi kepada pelanggar.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa di Kantor Bupati Aceh Barat, larangan merokok hanya berlaku tegas di dalam ruangan yang ber-AC, namun di luar ruangan banyak yang tetap merokok meskipun ada spanduk larangan. Kondisi serupa juga terjadi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Mengenai pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Faisal Arianto, selaku Kasubbag AUAK, menjelaskan bahwa larangan tersebut sudah diterapkan dengan menentukan area-area tanpa rokok, yang diinformasikan melalui spanduk dan banner. Namun, jika ada yang merokok di area tersebut, mereka hanya ditegur oleh dosen atau petugas keamanan. Hingga saat ini, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh belum menerapkan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan pelanggar hanya diberikan teguran.

Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga diterapkan di kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Suroto, MA menjelaskan bahwa di kompleks Masjid Agung Baitul Makmur, Qanun tersebut diterapkan dengan memasang pamflet yang berisi larangan merokok, dan pelanggar akan ditegur langsung oleh petugas keamanan masjid. Selain itu, pada acara-acara ramai seperti akad nikah, pengunjung diberitahukan mengenai larangan merokok di kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Sanksi bagi pelanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 hingga kini belum diterapkan di kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Suroto menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihak masjid belum menerapkan sanksi kepada pengunjung, melainkan hanya memberikan pendekatan persuasif berupa himbauan dan teguran jika ada yang merokok. Selain itu, kesadaran pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur cukup tinggi, terlihat dari minimnya jumlah pengunjung yang merokok di lingkungan masjid tersebut.

Berdasarkan keterangan dari para responden di atas, dapat dipahami bahwa penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, dan mereka hanya mendapat teguran sesuai ketentuan dalam qanun tersebut. Selain itu, dalam penerapannya, instansi terkait hanya melakukan sosialisasi, baik melalui pengumuman lewat pengeras suara maupun melalui tulisan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Namun dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya

Penegakan hukum tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber daya yang mencukupi terutama sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum tersebut. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap atau perilaku masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak terlepas dari turut serta masyarakat, menurut Muhammad Samsuddin partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memulai hidup sehat, apabila memang merokok sadarlah untuk tidak merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan

Tanpa Rokok, dan beranian diri untuk menegur teman atau kenalan yang merokok di area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Lebih lanjut Suroto menjelaskan bahwa "kekurangan personil khususnya anggota BKM dan pengamanan Masjid Agung Baitul Makmur menjadi salah satu kendala untuk menerapkan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Dengan jumlah securiti sekarang ini sangat sulit untuk mengawasi pengunjung karena perkarangan masjid yang luas. Selain itu securiti tugasnya bukan saja mengawasi terhadap pengunjung yang merokok tetapi masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan oleh sucuriti sehingga tidak semua perokok di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur terpantau oleh securiti.

Pengakuan Suroto di atas hampir sama dengan pengakuan Muhammad Samsuddin yang mejelaskan bahwa "Selama ini pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibebankan kepada instansi masing-masing. Karena jumlah personil khususnya pihak pengamanan yang kurang dan banyaknya tugas lain yang harus dikerjakan sehingga tidak semua pelanggar Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di intansi tersebut terpantau oleh petugas yang mengawasi kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan tidak ada personil khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengawasi setiap pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Selama ini penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibebankan kepada intansi masing-masing sehingga tidak semua intansi mempunyai sumber daya yang cukup dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Selain itu, salah satu faktor penghambat yaitu kebiasaan merokok masyarakat. Masih banyaknya pelanggaran berupa kegiatan merokok

terjadi karena rendahnya budaya hidup sehat di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Hal itu didukung dari kebiasaan dan pergaulan dilingkungan perokok dan kurang sadarnya sebagian masyarakat akan kesehatan dan akibat buruk dari rokok membuat pelaksanaan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan tanpa rokok yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut Suroto menjelaskan, menurut saya salah satu kendala dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kebiasaan masyarakat merokok, karena sudah menjadi kebiasaan dan bahkan rokok itu sebagai kebutuhan sehingga mengabaikan aturan yang ada di kawasan tanpa rokok. Dengan kata lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok menjadi salah satu alasan kurang berjalannya Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat.

Pengakuan Suroto di atas hampir sama dengan pernyataan Muhammad Samsuddin yang menjelaskan bahwa "setiap instansi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok sudah menempatkan himbauan untuk merokok, baik itu di rumah sakit, rumah ibadah, lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan. Namun walaupun sudah ada himbauan dalam bentuk tulisan tersebut masyarakat tidak mengindahkan tulisan itu dan masih saja merokok di lokasi tersebut. Hal ini membuktikan kurangnya kesadaran masyarakat terkait larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Walaupun sudah ada himbauan namun sebagian masyarakat masih tetap merokok di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya memberikan

sanksi teguran, karena selama ini penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya sebatas mensosialisasi baik dengan lisan seperti membuat pengumuman dengan menggunakan pengeras suara ataupun dengan tulisan seperti spanduk, banner atau himbauan lainnya. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara maksimal karena masih banyak ditemukan masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam qanun tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya sumber daya manusia khususnya yang bertugas pengawasan pelaksanaan qanun, karena selama ini pelaksanaan qanun hanya dibebankan kepada instansi masing-masing yang menjadi objek kawasan tanpa rokok. Selain itu kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Aurora, E. D., Welis, W., Andria, Y., & Sari, A. P. (2023). Perilaku Merokok Terhadap Kapasitas Vital Paru-paru. *Journal Power Of Sports*, 6(2), 121–132. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jpos.v6i2.18121>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep Hukum*. Nusamedia.
- Hasni, H. (2019). *Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare)*. IAIN Parepare.
- Kartini, S. (2020). *Kesadaran Hukum*. Alprin.
- MUI, T. L. F. (2002). *Himpunan Fatwa MUI*. Majelis Ulama Indonesia.
- Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367–376. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7269.367->

376

- Rahmah, R. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rini, P. S., & Majid, Y. A. (2022). *Analisis Kebiasaan Merokok dan Status Gizi pada Remaja*. Wawasan Ilmu.
- Rochayati, A. S., & Hidayat, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja Di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kuningan. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jks.2015.10.1.587>
- Suaib, S. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Akreditasi Di SMP Negeri 2. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 95–126.
<https://doi.org/10.59585/bajik.v2i2.214>
- Sulaiman, I. (2021). *Pengemasan dan Penyimpanan Produk Bahan Pangan*. Syiah Kuala University Press.